

Konsep Organisasi Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 7 Manado: *Analisis Tugas Personil, Struktur, Alur Layanan, dan Kesesuaian dengan Program BK Komprehensif*

Meisie Mangantes¹, Deitje Adolfien Katuuk², Karnius Lase³, Yosua Swardin Laia⁴.

^{1, 2, 3, 4} Pascasarjana S2 Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Manado (UNIMA), Indonesia

Email: ¹miesiemangantes@unima.ac.id, ²deitjeadolffienkatuuk@unima.ac.id,
³karniuslase@gmail.com, ⁴yosuaswardinlaia@gmail.com.

Diterima	03	Mei	2026
Disetujui	30	Juni	2026
Dipublish	30	Juni	2026

Abstract

This study analyzes the organizational structure of Guidance and Counseling (GC) services at SMA Negeri 7 Manado by examining personnel responsibilities, service flow, and the alignment of implementation with the comprehensive school counseling program framework. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis involving the principal, vice principals, GC coordinator, counselors, and homeroom teachers. The findings indicate that although the GC organizational structure is formally established, its implementation does not fully adhere to the standards of a comprehensive counseling program. The counselor–student ratio of 1:375 leads to predominantly reactive services, limited documentation, and the absence of written standard operating procedures for case handling. Service flow is flexible and frequently bypasses formal hierarchical procedures. Most services still focus on basic and responsive interventions, while individual planning, career development, and system support remain underdeveloped. The study recommends strengthening GC management through the addition of personnel, the development of formal SOPs, needs-based program planning, and improved collaboration across school units to align with the principles of a comprehensive counseling program.

tingkat kesesuaiannya dengan konsep program BK komprehensif. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator BK, guru BK, dan wali kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi BK telah terbentuk secara formal, namun implementasinya

323



belum memenuhi standar program BK komprehensif. Rasio guru BK–siswa yang mencapai 1:375 menyebabkan layanan lebih bersifat responsif daripada preventif, serta berdampak pada terbatasnya waktu konseling, lemahnya dokumentasi, dan belum adanya SOP alur penanganan kasus. Alur layanan berjalan fleksibel dan tidak selalu mengikuti jalur komando struktural. Program BK sebagian besar masih terfokus pada layanan dasar dan responsif, sedangkan dukungan sistem, perencanaan individual, dan pengembangan karier belum terlaksana optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan manajemen BK melalui penambahan personil, penyusunan SOP layanan, pengembangan program berbasis kebutuhan, serta peningkatan kerja sama antarunit sekolah agar selaras dengan prinsip BK komprehensif.

Kata kunci: *Bimbingan dan konseling, struktur organisasi BK, program BK komprehensif.*

Pendahuluan

Pendidikan di sekolah tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan kepribadian, sosial, dan kemampuan penyesuaian diri peserta didik. Pada jenjang sekolah menengah, peserta didik berada pada fase remaja yang ditandai dengan ketidakstabilan emosional dan pencarian jati diri, sehingga mereka rentan menghadapi berbagai persoalan perkembangan. Kondisi ini menuntut adanya layanan Bimbingan dan Konseling (BK) yang berfungsi membantu peserta didik mengenali potensi dirinya, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan, serta merencanakan masa depan secara lebih terarah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya organisasi BK yang terstruktur dengan baik. Efektivitas layanan BK hanya dapat dicapai apabila seluruh personil sekolah menjalankan perannya secara kolaboratif. (Prayitno, 2012; Winkel & Hastuti, 2010) juga menemukan bahwa keberhasilan program BK sangat bergantung pada pembagian tugas yang jelas dan koordinasi antar-personil sekolah. Bimbingan dan konseling (BK) di sekolah hadir sebagai layanan bantuan sistematis untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier. (Prayitno, 2012; Permendikbud No.111 Tahun



2014). Layanan BK tidak hanya menyelesaikan masalah siswa yang bersifat insidental, tetapi juga berfungsi preventif dan pengembangan melalui program yang terencana dan berkesinambungan. (Prayitno, 2012; Winkel & Hastuti, 2010). Agar layanan

BK berjalan efektif, diperlukan organisasi BK yang jelas, mencakup pembagian tugas personil, alur koordinasi, serta hubungan struktural dengan manajemen sekolah. Sejumlah penelitian juga mengungkapkan berbagai kelemahan dalam implementasi BK di sekolah, seperti program yang tidak berbasis kebutuhan siswa, minimnya kerja sama antar-personil, serta lemahnya struktur organisasi (Prayitno, 2012; Winkel & Hastuti, 2010)

Kelemahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal BK komprehensif dengan praktik di lapangan.

SMA Negeri 7 Manado memperlihatkan situasi serupa. Sekolah dengan jumlah siswa sekitar 1.500 orang hanya memiliki empat guru BK, sehingga rasio layanan mencapai 1:375, jauh dari standar yang dianjurkan. Selain itu, pembagian tugas antar-personil BK, mekanisme koordinasi, dan alur penanganan kasus belum sepenuhnya mengikuti struktur manajerial yang ideal. Program BK yang ada juga belum tersusun secara komprehensif, dan

sebagian besar layanan masih bersifat responsif daripada preventif. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam mengenai bagaimana struktur organisasi BK bekerja dalam konteks sekolah besar.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan personil yang terlibat dalam layanan BK, menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya, menganalisis struktur organisasi BK, menilai kesesuaian dengan program BK komprehensif, serta mengkaji alur penanganan kasus di SMA Negeri 7 Manado.

Penelitian ini terletak pada analisis integratif antara teori organisasi BK, kondisi empiris sekolah, serta evaluasi terhadap alur komando dalam penanganan kasus siswa. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan struktur BK, tetapi juga mengidentifikasi hambatan-hambatan manajerial, sekaligus memberikan dasar penguatan sistem organisasi BK yang lebih efektif.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi baik secara akademis maupun praktis dalam upaya meningkatkan kualitas layanan BK di SMA Negeri 7 Manado dan dapat



menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dalam pengembangan manajemen layanan BK yang profesional. dokumentasi. (Hasil Catatan Lapangan Peneliti, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan memahami fenomena secara mendalam, kontekstual, dan naturalistik tentang bagaimana organisasi BK di SMA Negeri 7 Manado dibentuk dan dijalankan. (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna dan dinamika hubungan antar-personil BK, prosedur layanan, serta kendala yang dihadapi berdasarkan pengalaman langsung para pelaku di lapangan.

Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 7 Manado yang secara administratif beralamat di Jalan Tololiu Supit Nomor 25, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, dengan kode pos 95119. Sekolah ini dipilih karena memiliki jumlah peserta didik yang besar, struktur layanan BK yang relatif lengkap, serta sedang mengembangkan berbagai program penguatan layanan siswa. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2025 melalui serangkaian kegiatan wawancara, observasi, dan studi

Subjek penelitian mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah (terutama bidang kurikulum dan kesiswaan), koordinator BK, guru BK/konselor, serta beberapa wali kelas yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan layanan BK. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan layanan BK di SMA Negeri 7 Manado.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) wawancara semi terstruktur kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator BK, dan guru BK untuk menggali informasi mengenai struktur organisasi, pembagian tugas, dan alur penanganan kasus, (2) observasi terhadap kegiatan layanan BK, interaksi guru BK dengan siswa, serta penggunaan ruang dan fasilitas BK, dan (3) studi dokumentasi terhadap struktur organisasi sekolah, pembagian tugas, program kerja BK, buku kasus, dan arsip administrasi terkait.

Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan memperhatikan keterkaitan antara



temuan empiris dan kerangka teori BK komprehensif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (kepala sekolah, guru BK, wali kelas), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), dan diskusi dengan rekan sejawat untuk meminimalkan bias peneliti.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian mengenai organisasi Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 7 Manado menghasilkan sejumlah data penting yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen sekolah. Seluruh data yang dikumpulkan difokuskan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan

1. Apa saja yang menjadi tugas bapak ibu/terkait bimbingan dan konseling ?

Kepsek “menyampaikan bahwa ia mendukung penuh pelaksanaan layanan BK, menyediakan ruang, sarana prasarana, serta memberikan kesempatan kepada guru BK untuk melaporkan perkembangan secara berkala. Kepala sekolah juga memastikan layanan BK berada dalam jalur visi dan misi sekolah” (25 November 2025)

Koordinator BK “mengatakan bahwa ia

mengatur pembagian tugas guru BK, menyusun program tahunan dan semester, serta menjadi penghubung dengan pimpinan sekolah. Koordinator BK juga menyatakan bahwa mereka rutin melakukan rapat evaluasi layanan”. ” (25 November 2025)

Guru BK “mengatakan bahwa mereka menangani sekitar 375 siswa per orang, melakukan konseling individual/kelompok, layanan klasikal, layanan informasi, konsultasi, serta menangani kasus dari wali kelas dan guru mata pelajaran”. ” (25 November 2025)

Wali kelas mengatakan bahwa mereka ini menjadi pihak pertama yang mendeteksi masalah siswa ibarat orang tua kedua yang memperhatikan anak-anaknya, lalu melakukan rujukan kepada guru BK ketika ditemukan kesulitan belajar atau masalah perilaku jika kedapatan melanggar tata tertip sekolah. ” (25 November 2025)

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui hasil observasi di lapangan Hasil Observasi, antara lain ;

- 1) Kepala sekolah memberikan supervisi dan dukungan terhadap kegiatan BK dan hadir dalam pelaporan berkala.



- 2) Koordinator BK aktif mengoordinasikan rapat, pembagian tugas, serta pengawasan administrasi BK.
- 3) Guru BK terlihat melakukan layanan konseling, menangani kasus, dan mengelola administrasi meskipun rasio siswa sangat tinggi.
- 4) Wali kelas terlibat dalam proses rujukan siswa serta berinteraksi intensif dalam memantau perkembangan siswa.

Berdasarkan wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa :

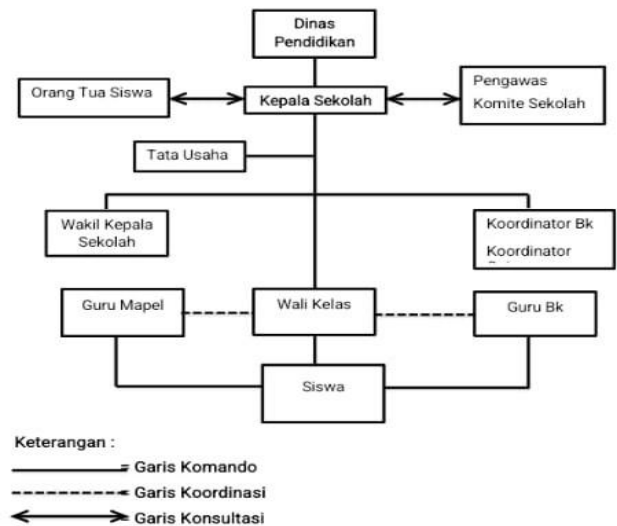
Struktur tugas personil BK sudah jelas, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya merata karena rasio siswa yang besar. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah berfungsi sebagai pengarah kebijakan, sedangkan koordinator BK mengelola administrasi dan distribusi layanan. Guru BK menjalankan sebagian besar layanan secara reaktif karena beban kerja yang tinggi.

Wali kelas menjadi kunci deteksi awal, namun dokumentasi rujukan belum sistematis. Dengan begitu peneliti menyimpulkan bahwa tugas personil berjalan, namun belum optimal untuk model BK komprehensif.

2. Bagaimana Struktur Organisasi

Bimbingan dan Konseling di sekolah Bapak/Ibu ?

Berdasarkan data yang di peroleh pada SMA Negeri 7 Manado, terkait struktur Bk, antara lain :



Penjelasannya :

1. Garis Komando (—————)

Garis komando menggambarkan hubungan hirarkis atau jalur perintah resmi dari atasan ke bawahan. Dalam gambar, garis komando terlihat dari:

Dinas Pendidikan → Kepala Sekolah. Artinya, Kepala Sekolah bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pendidikan. Segala kebijakan yang berkaitan dengan BK juga mengikuti arahan dinas.

Kepala Sekolah → Wakil Kepala Sekolah, Tata Usaha, Koordinator BK/OSIS, Wali Kelas, Guru BK, dan Guru Mapel. Ini menunjukkan bahwa Kepala Sekolah adalah



pucuk pimpinan yang mengatur keseluruhan fungsi sekolah, termasuk BK.

Wali Kelas → Siswa. Ini menunjukkan bahwa Wali Kelas bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan kelas, termasuk pemantauan perilaku dan pengembangan siswa sebelum merujuk ke Guru BK.

Guru BK → Siswa. Pada konteks layanan, Guru BK memberikan layanan langsung kepada siswa melalui konseling, pengarahan, dan bimbingan.

2. Garis Koordinasi ()

Garis koordinasi menggambarkan hubungan kerja sama setara antarunit untuk pelaksanaan kegiatan. Gambar menunjukkan koordinasi antara: Wali Kelas ↔ Guru BK. Ini merupakan hubungan penting dalam praktik BK di sekolah. Koordinator BK ↔ Guru BK. Koordinator BK mengatur program, jadwal layanan, dan memastikan guru BK bekerja sesuai program tahunan dan semesteran.

3. Garis Konsultasi (↔)

Garis konsultasi adalah hubungan komunikasi timbal balik yang tidak bersifat komando, melainkan sebagai mitra. Dalam gambar terlihat : Kepala Sekolah ↔ Orang Tua Siswa. Ini menunjukkan interaksi dua arah berupa : Pengaduan masalah siswa
Rapat sekolah, Informasi perkembangan peserta didik, Dukungan terhadap layanan BK

Kepala Sekolah ↔ Pengawas / Komite Sekolah. Artinya Kepala Sekolah dapat memberikan laporan serta mendapatkan masukan dari pihak pengawas maupun komite. Hal ini penting untuk evaluasi layanan BK agar memenuhi standar mutu.

4. Posisi BK dalam Struktur Organisasi Sekolah

Koordinator BK → Guru BK (Komando langsung). Koordinator BK mengawasi seluruh program BK: Penyusunan program tahunan
Administrasi BK Evaluasi layanan konseling
Supervisi kegiatan Guru BK
Guru BK bekerja sama dengan Guru Mapel dan Wali Kelas. Ini sesuai standar layanan BK (Permendikbud No. 111 Tahun 2014), bahwa BK harus: Kolaboratif, Preventif, Kuratif, Berbasis kebutuhan siswa. Struktur di gambar sudah mencerminkan hubungan itu.

5. Peran Siswa dalam Struktur

Siswa ditempatkan di bagian paling bawah namun menjadi fokus utama. Semua garis komando dan koordinasi berujung kepada layanan yang diberikan kepada siswa. Siswa berada di bawah: Wali kelas (komando), Guru BK (komando/ Guru Mapel (koordinasi) Koordinator BK (komando tidak langsung dari guru BK). Ini menunjukkan pendekatan layanan terpadu.

6. Kekuatan Struktur BK berdasarkan Gambar



Jelas alur komandonya: dari dinas → kepala sekolah → koordinator BK → guru BK

Koordinasi efektif: antara wali kelas dan guru BK Keterlibatan orang tua: melalui jalur konsultasi dua arah Pengawas & komite terlibat: mendukung evaluasi BK, program BK dapat berjalan sistematis: karena koordinator BK punya posisi strategis. Struktur/bagan diatas berdasarkan data yang di dapatkan struktur organisasi bimbingan dan konseling pada SMA Negeri 7 Manado. ” (25 November 2025)

Pendapat peneliti terhadap Struktur BK SMA Negeri 7 Manado berada pada kategori baik secara desain dan cukup efektif dalam implementasi lapangan. Dengan beberapa penguatan seperti peningkatan kuantitas SDM BK, digitalisasi administrasi, dan penguatan kemitraan dengan orang tua, layanan BK dapat menjadi lebih optimal dan mampu mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik dari aspek akademik, pribadi-sosial, maupun karier.

3. Bagaimana Alur Layanan Bimbingan dan Konseling yang di laksanakan pada sekolah Bapak/Ibu terutama untuk siswa yang melanggar tata tertip sekolah ?

Wakepsek Akademik ”mengatakan bahwa

alur layanan BK idealnya mengikuti prosedur berjenjang mulai dari deteksi awal oleh wali kelas, dilanjutkan rujukan ke guru BK, kemudian diproses sesuai tingkat keseriusan kasus. ” (25 November 2025)

Koordinator BK ”mengatakan bahwa kami telah menetapkan alur penanganan kasus secara internal, namun belum dituangkan dalam SOP tertulis. Dalam praktiknya, banyak kasus masuk langsung dari wali kelas atau guru mapel, dan terkadang langsung ditangani oleh pihak kesiswaan sebelum melibatkan BK.

Karena biasanya alur layanan sering menyesuaikan kasus yang dilakukan siswa, sehingga tidak selalu linear” ” (25 November 2025)

Guru BK ”mengatakan bahwa rujukan siswa tidak selalu melewati prosedur formal. Banyak siswa datang langsung ke ruang konseling tanpa pengantar wali kelas, dan beberapa kasus disampaikan oleh guru mata pelajaran secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Dengan begituan alur layanan sebenarnya jelas, tetapi pelaksanaannya fleksibel karena beban kasus yang tinggi.” ” (25 November 2025)

Wali kelas ”mengatakan bahwa saya sebagai



wali kelas paling pertama yang menemukan masalah siswa melalui ketidakhadiran, nilai mereka menurun, atau dapat kasus lain dorang. Namun kadang jika ada kasus siswa proses rujukan seringkali tidak terdokumentasi, dan beberapa kasus diselesaikan langsung oleh wali kelas tanpa melalui BK. Jadi alur layanan sangat tergantung situasi dan terkadang perlu tindakan cepat begitu” ” (25 November 2025)

Berdasarkan analisis lapangan Penanganan kasus ringan seperti terlambat, tidak menaati tata tertib sekolah, kadang kala dilakukan langsung oleh wali kelas atau wakil kepala sekolah tanpa dicatat sebagai layanan BK.

- 1) Guru BK menerima rujukan tidak hanya dari wali kelas, tetapi juga dari siswa sendiri, guru mapel, atau pihak kesiswaan.
- 2) Tidak ditemukan SOP tertulis atau bagan alur yang dipasang secara resmi di ruang BK.
- 3) Alur layanan berjalan ganda: ada yang sesuai prosedur, ada yang pendek karena situasi lapangan.
- 4) Dokumentasi layanan masih minim sehingga tidak terlihat pola penanganan yang konsisten.

Pendapat Peneliti bahwa :

- 1) Pemahaman tentang alur layanan BK sudah dimiliki oleh semua pihak, tetapi implementasinya belum terstandar karena tidak ada SOP tertulis.
- 2) Ketiadaan prosedur resmi menyebabkan variasi alur, tergantung urgensi, relasi personal, dan ketersediaan guru BK.
- 3) Dokumentasi yang lemah menyulitkan evaluasi layanan dan mengurangi keselarasan dengan model BK komprehensif.
- 4) Alur layanan cenderung bersifat fungsional, namun belum sistematis atau komprehensif.

Secara keseluruhan, alur layanan BK SMA Negeri 7 Manado berjalan tetapi belum baku, sehingga efektivitas layanan belum maksimal.

4. Bagaimana Analisa Bapak/Ibu terkait Kesesuaian Program Bk Komprehensif di Sekolah SMA Negeri 7 Manado ini ?

Wakepsek ”menyatakan bahwa program BK di sekolah sudah berjalan, terutama dalam bentuk layanan konseling dan pembinaan siswa. Tapi saya juga mengakui bahwa program BK belum sepenuhnya mengikuti model komprehensif karena tidak semua dokumen lengkap dan harus ada pembenahan lainnya BK harus berkembang, tetapi perlu



tambahan SDM agar program bisa lebih luas dan terstruktur lagi". " **(25 November 2025)**

Koordinator BK *"mengatakan bahwa program BK sebenarnya sudah disusun setiap tahun, namun fokus layanan lebih banyak pada layanan dasar dan responsif, Perencanaan individual, dukungan sistem, dan program pengembangan karier belum bisa dilakukan maksimal karena keterbatasan waktu dan rasio siswa yang banyak disekolah ini. kami ingin menjalankan BK komprehensif, tetapi yang terjadi lapangan penanganan kasus secara langsung" "* **(25 November 2025)**

Guru BK *"mengatakan kami lebih sering memberikan layanan responsif seperti konseling masalah perilaku, motivasi belajar, dan kasus keluarga. Layanan klasikal dan informasi masih kami lakukan, tetapi belum sistematis. Untuk dokumen program belum lengkap karena banyak waktu kami hanya tersita untuk menangani kasus harian dan perencanaan individual belum terlaksana optimal karena rasio 1:375 terlalu tinggi bagi kami". "* **(25 November 2025)**

Wali kelas *"saya mengetahui keberadaan program BK, tetapi tidak mengetahui secara lengkap isi dokumen program. Mereka sering*

bekerja sama dengan guru BK dalam penanganan siswa, namun belum pernah menerima sosialisasi formal terkait program BK komprehensif. Jadi program BK ini terasa lebih kepada penanganan masalah, bukan pengembangan." " **(25 November 2025)**

Observasi di lapangan menemukan bahwa :

- 1) Tidak terdapat dokumen program komprehensif yang mencakup empat komponen (layanan dasar, layanan perencanaan individual, layanan responsif, dukungan sistem).
- 2) Layanan dasar terlihat dalam kegiatan informasi, bimbingan klasikal, dan pembinaan disiplin.
- 3) Layanan responsif paling dominan, terutama konseling individual dan penanganan kasus disiplin.
- 4) Layanan perencanaan individual tidak terlihat dalam bentuk program yang sistematis (contoh: portofolio konseling, pemetaan minat-bakat, atau rencana karier).
- 5) Dukungan sistem belum berjalan maksimal dan terbatas pada koordinasi informal.
- 6) Rasio guru BK-siswa yang tinggi menyebabkan program bersifat reaktif, bukan preventif.



Peneliti menilai bahwa:

Struktur organisasi BK sudah mendukung, tetapi isi program belum mengikuti tuntutan BK komprehensif. Pelaksanaan layanan masih didominasi layanan responsif dan insidental. Tanpa dokumen program yang lengkap, layanan tidak dapat dievaluasi secara menyeluruh. Dan ketidakseimbangan antara tuntutan layanan dan jumlah personil menyebabkan program sulit berjalan sistematis. Serta BK SMA Negeri 7 Manado belum memenuhi standar BK komprehensif model Gysbers & Henderson, tetapi telah memiliki pondasi organisasi yang kuat untuk berkembang. Secara keseluruhan saya mengatakan, BK SMA Negeri 7 Manado belum sepenuhnya selaras dengan Program BK Komprehensif, namun memiliki potensi besar jika dilakukan perbaikan pada dokumentasi, penyusunan program, SOP, serta penambahan guru BK.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis konsep struktur Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 7 Manado serta perbandingan dengan teori organisasi BK menurut Prayitno (2012), diperoleh bahwa layanan BK di sekolah ini ditangani oleh 1 orang koordinator dan 3 orang

guru BK dengan total jumlah siswa sekitar 1.500 orang. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap guru BK melayani sekitar 375 peserta didik, jumlah yang jauh melebihi standar nasional rekomendasi ABKIN yang menetapkan 1 guru BK melayani maksimal 150 peserta didik. Secara struktural, BK berada di bawah Wakasek Kesiswaan dan berkoordinasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, serta kepala sekolah.

Dalam pelaksanaan layanan, guru BK telah menjalankan beberapa fungsi layanan seperti konseling individual, layanan informasi, konsultasi dengan wali kelas maupun guru mata pelajaran, serta tindakan tindak lanjut terhadap siswa bermasalah. Namun, melalui evaluasi kelembagaan diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan terkait alur koordinasi, pemerataan kasus, dan pelaksanaan program yang belum seluruhnya berbasis pada model Bimbingan dan Konseling Komprehensif.

Berdasarkan hasil data lapangan yang diperoleh di SMA Negeri 7 Manado dibantu dengan pengambilan data dan penarikan kesimpulan menurut teori maka :

Struktur BK Berbasis Program BK



Komprehensif

Hasil analisis lapangan dengan menggunakan model Bimbingan dan Konseling Komprehensif menurut Prayitno (2012) yang meliputi empat komponen utama layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan system maka struktur BK di SMA Negeri 7 Manado belum sepenuhnya mencerminkan pola BK komprehensif.

Struktur BK sudah menunjukkan pembagian peran, yakni adanya koordinator BK, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan Wakasek Kesiswaan. Namun struktur tersebut lebih menonjol sebagai struktur administratif, bukan sebagai struktur programatik. Hal ini terlihat dari:

- 1) Belum terdapat dokumen program tahunan, semesteran, dan RPLBK (Rencana Pelaksanaan Layanan BK) yang terintegrasi dengan kebutuhan perkembangan siswa.
- 2) Rasio guru BK yang tidak memadai, sehingga pelaksanaan layanan dasar (misalnya orientasi, informasi karier, layanan klasikal) tidak berjalan sesuai standar.
- 3) Layanan peminatan dan perencanaan individual masih dilakukan secara

sporadis, belum berbasis instrumen asesmen bakat-minat yang komprehensif.

- 4) Layanan dukungan sistem seperti kolaborasi dengan orang tua, komite, dan instansi eksternal belum dilakukan secara sistematis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun struktur BK telah berjalan fungsional, Basis program BK komprehensif belum terimplementasi secara penuh. Struktur yang ada baru menunjukkan bentuk “pelayanan BK rutin”, bukan “program BK komprehensif yang terencana”.

Alur Penanganan Kasus Garis Komando Struktural

Hasil wawancara dengan guru BK dalam penanganan kasus, guru BK telah melakukan langkah-langkah konseling individual, pengumpulan data (data pribadi, observasi, wawancara), serta memberikan rekomendasi kepada wali kelas dan orang tua. Namun pada praktiknya, garis komando sesuai struktur organisasi belum sepenuhnya berjalan optimal.

Menurut struktur ideal:

- 1) Guru BK menerima laporan atau menemukan masalah.
- 2) Guru BK melapor kepada Koordinator BK.



- 3) Koordinator BK berkoordinasi dengan individual, layanan informasi, dan konsultasi. Wakasek Kesiswaan. Namun dalam aspek implementasi:

- 4) Tindak lanjut dilakukan berdasarkan 1) Layanan klasikal bagi semua siswa masih klasifikasi kasus ringan, sedang, atau terbatas karena rasio guru BK yang sangat berat. tinggi.

Namun hasil analisis menunjukkan bahwa:

- 1) Beberapa guru BK langsung memberi tindakan tanpa pelaporan berjenjang, akibat beban kasus yang tinggi.
- 2) Koordinasi antara Wali Kelas dan BK terkadang tidak terdokumentasi dengan baik.
- 3) Ada kasus yang langsung ditangani oleh guru lain sebelum melalui BK, terutama kasus kedisiplinan berat.
- 4) Dokumentasi konseling dan alur penanganan kasus belum menggunakan format standar.
- 2) Program pencegahan (preventif) belum berjalan optimal karena guru BK banyak tersita oleh kasus responsif.
- 3) Tugas administrasi guru BK (pengisian instrumen, pembuatan laporan bulanan/semester, dokumentasi layanan) cukup berat untuk jumlah personel yang sedikit.

2. Hambatan Pelaksanaan

Hambatan yang ditemukan meliputi:

1. Rasio guru BK tidak ideal, 1:375 siswa. Hal ini menyebabkan layanan tidak bisa dilakukan sesuai standar kualitas BK komprehensif.
2. Dokumen program BK belum lengkap. Seperti program tahunan, RPLBK, instrumen asesmen, evaluasi layanan, dan program remediasi.
3. Kurangnya ruang konseling yang layak dan privat, sehingga konseling tidak berlangsung nyaman.
4. Alur koordinasi belum terstandar, sehingga pelaporan kasus sering tidak terdokumentasi baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus belum sepenuhnya mengikuti garis komando struktur BK, karena masih terdapat pola “penanganan langsung di lapangan” yang sering dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak.

Analisa Operasional, Hambatan, dan Evaluasi

1) Analisis Operasional

Secara operasional, BK telah menjalankan fungsi layanan dasar seperti konseling



5. Peran wali kelas dan guru mata pelajaran belum optimal dalam mendukung pendataan dan deteksi dini masalah siswa.
3. Evaluasi
- Evaluasi BK menunjukkan bahwa:
- 1) Layanan sudah berjalan, tetapi belum memenuhi parameter BK komprehensif.
 - 2) Program belum berbasis asesmen kebutuhan siswa.
 - 3) Pola komunikasi antar-personil BK perlu diperkuat.
 - 4) Sistem dokumentasi perlu distandardisasi (format konseling, format penanganan kasus, format laporan perkembangan siswa).
 - 5) Sekolah perlu menambah jumlah guru BK atau membuat kebijakan struktur layanan yang lebih mendukung.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen mengenai organisasi Bimbingan dan Konseling (BK) di SMA Negeri 7 Manado, diperoleh sejumlah temuan penting yang menggambarkan kondisi objektif layanan BK, efektivitas pelaksanaan tugas personil, kesesuaian alur layanan dengan standar ideal,

serta tingkat keterpenuhan komponen dalam program BK komprehensif. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan BK di SMA Negeri 7 Manado telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan signifikan dalam aspek administratif, struktural, implementatif, dan manajerial agar mampu memenuhi tuntutan perkembangan siswa di sekolah besar seperti SMA Negeri 7 Manado.

1. Pelaksanaan Tugas Personil BK

Struktur tugas personil BK di SMA Negeri 7 Manado pada dasarnya telah dirancang dengan cukup jelas. Kepala sekolah memberikan dukungan kebijakan, supervisi, serta arahan strategis terhadap pelaksanaan layanan BK. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kesiswaan mendukung koordinasi program, terutama ketika kasus siswa menyangkut aspek akademik dan tata tertib. Koordinator BK memiliki peran sentral dalam mengatur pembagian tugas guru BK, menyusun program BK tahunan dan semester, serta bertanggung jawab menjadi penghubung resmi antara BK dan pimpinan sekolah.

Guru BK sebagai pelaksana teknis layanan berperan menangani konseling individual, konseling kelompok, layanan klasikal, rujukan kasus, serta administrasi program. Wali kelas



menjalankan fungsi monitoring awal terhadap perkembangan peserta didik dan bertindak sebagai pihak pertama yang mendeteksi adanya masalah yang dialami siswa di kelas. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan tugas tersebut belum optimal, terutama karena:

- a) Rasio guru BK terhadap jumlah siswa sangat tidak ideal, yaitu 1:375, sehingga berdampak pada kualitas layanan.
- b) Pelayanan cenderung berfokus pada kasus-kasus tertentu dan bersifat reaktif, bukan preventif maupun pengembangan.
- c) Dokumentasi rujukan, catatan konseling, dan pelaporan perkembangan siswa belum dilakukan secara konsisten dan standar.
- d) Koordinasi antar-personil sering berjalan informal, sehingga alur pelaporan tidak selalu terdokumentasi.

Dengan demikian, meskipun setiap personil memahami peran dan tanggung jawabnya, implementasi tugas di lapangan belum mencapai optimalisasi yang mendukung terciptanya layanan BK komprehensif.

2. Struktur Organisasi BK di SMA Negeri 7 Manado

Struktur organisasi BK di sekolah ini secara desain telah mencerminkan pola hubungan komando dan koordinasi sebagaimana

disarankan dalam teori manajemen pendidikan dan standar Permendikbud No. 111 Tahun 2014. Kepala sekolah berada pada posisi puncak komando, diikuti oleh wakil kepala sekolah, koordinator BK, dan guru BK. Struktur ini memungkinkan terjadinya alur kebijakan dan evaluasi yang jelas dari pimpinan ke pelaksana layanan.

Koordinator BK memiliki kedudukan strategis dalam memfasilitasi koordinasi antar-guru BK, merancang program, dan memastikan keberjalanan administrasi layanan. Selain itu, terdapat garis koordinasi yang kuat antara guru BK dan wali kelas, yang menjadi fondasi penting untuk pelaksanaan layanan preventif maupun kuratif. Garis konsultasi antara kepala sekolah dengan orang tua, pengawas sekolah, dan komite sekolah juga menunjukkan adanya dukungan eksternal yang dapat berkontribusi terhadap perbaikan layanan.

Meskipun demikian, struktur ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kinerja organisasi yang optimal karena:

- a) Belum tersedianya SOP tertulis yang mengatur alur tugas, koordinasi, rujukan, dan evaluasi.
- b) Kurangnya penggunaan teknologi administrasi yang mendukung dokumentasi layanan secara tertib dan



sistematis.

- c) Keterlibatan komite dan pengawas lebih bersifat evaluatif umum, belum spesifik pada peningkatan layanan BK.

Dengan demikian, struktur BK SMA Negeri 7 Manado tergolong baik secara konseptual tetapi masih memerlukan penguatan dalam implementasi dan standarisasi.

3. Alur Layanan Bimbingan dan Konseling

Temuan penelitian menunjukkan bahwa alur layanan BK di SMA Negeri 7 Manado belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip alur layanan yang baku. Secara konseptual, personil memahami bahwa proses ideal dimulai dari deteksi awal oleh wali kelas, dilanjutkan dengan rujukan kepada guru BK, kemudian konseling dan tindak lanjut sesuai kebutuhan siswa. Namun dalam praktik lapangan, alur layanan menunjukkan variasi yang cukup besar, seperti:

- a) Kasus ringan seperti keterlambatan, pelanggaran tata tertib, atau ketidakhadiran sering diselesaikan langsung oleh wali kelas atau wakil kepala sekolah tanpa melibatkan BK.
- b) Banyak siswa datang langsung ke guru BK tanpa melalui prosedur rujukan formal.

- c) Terdapat kasus yang langsung masuk ke pihak kesiswaan tanpa koordinasi awal dengan BK.

- d) Dokumentasi rujukan dan proses konseling masih minim, sehingga sulit menelusuri alur penanganan kasus secara menyeluruh.

Alur layanan BK bersifat fungsional tetapi belum sistematis. Hal ini menyebabkan layanan tidak menunjukkan konsistensi, tidak memiliki pola penanganan yang jelas, dan sulit dievaluasi untuk kepentingan pengembangan kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa alur layanan BK di SMA Negeri 7 Manado berjalan tetapi belum terstandar, sehingga dampaknya tidak maksimal terhadap pemenuhan kebutuhan perkembangan siswa.

4. Kesesuaian Program BK dengan Model BK Komprehensif

Penelitian ini mengungkap bahwa program BK di SMA Negeri 7 Manado belum mencapai standar program BK komprehensif sebagaimana dikembangkan oleh Gysbers & Henderson maupun dikonseptualisasikan oleh Prayitno. Hal ini terlihat dari:

- a) Program BK yang disusun belum mencakup keseluruhan komponen layanan, terutama perencanaan individual, program karier, dan



dukungan sistem.

- b) Pelaksanaan layanan lebih banyak terfokus pada layanan responsif, yakni menangani kasus siswa setelah muncul, bukan mencegah atau mengembangkan potensi siswa secara proaktif.
- c) Belum adanya asesmen kebutuhan siswa secara terstruktur untuk menjadi dasar penyusunan program tahunan.
- d) Keterbatasan personil menyebabkan banyak layanan preventif dan pengembangan tidak berjalan optimal.
- e) Dokumentasi program, pelaporan, dan evaluasi layanan belum sistematis sehingga tidak memungkinkan perbaikan program berbasis data.

Dari hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi program BK SMA Negeri 7 Manado berada pada kategori cukup berjalan, namun belum memenuhi kriteria program BK komprehensif yang menuntut kelengkapan struktur, sistem, dan dokumentasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai

berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia BK

- a) Sekolah perlu menambah guru BK untuk memperbaiki rasio menjadi lebih ideal dan mendekati standar nasional. Rasio yang proporsional akan meningkatkan kualitas layanan, mengurangi beban guru BK, dan memperluas cakupan program.
- b) Memberikan pelatihan profesional kepada guru BK tentang konseling modern, asesmen psikologis pendidikan, layanan karier, serta manajemen dokumentasi.

2. Penyusunan dan Implementasi SOP Layanan BK

- a) Sekolah harus menyusun SOP resmi yang mencakup alur rujukan, langkah penanganan kasus, mekanisme koordinasi antar-personil, serta standar dokumentasi.
- b) SOP perlu disosialisasikan kepada semua guru, wali kelas, staf kesiswaan, dan bahkan orang tua, agar prosedur layanan berjalan seragam dan tidak bergantung pada interpretasi individual.

3. Penguatan Administrasi dan Dokumentasi Layanan

- a) Sekolah perlu menggunakan sistem administrasi digital atau database



terintegrasi untuk mendokumentasikan kasus, rujukan, perkembangan konseling, dan pelaksanaan program BK.

- b) Dengan dokumentasi yang baik, sekolah dapat melakukan evaluasi perkembangan siswa dan mengidentifikasi pola-pola masalah secara lebih akurat.

4. Penataan Ulang Program BK Menuju Model Komprehensif

- a) Program BK tahunan harus disusun berdasarkan asesmen kebutuhan siswa (needs assessment).
- b) Layanan perlu mencakup empat komponen utama:
- c) layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem.
- d) Program pengembangan karier, penguatan karakter, dan pendampingan belajar perlu diperluas agar layanan lebih menyentuh seluruh aspek perkembangan siswa.

5. Memperkuat Kolaborasi dengan Orang Tua dan Komunitas

- a) Sekolah perlu memperluas keterlibatan komite sekolah, orang tua, dinas pendidikan, dan pihak profesional eksternal seperti psikolog dalam mendukung layanan BK.

- b) Komunikasi reguler antara BK dan orang tua perlu difasilitasi untuk memastikan perkembangan siswa dipantau secara konsisten.

6. Evaluasi Berkala Program BK

- a) Evaluasi program BK harus dilakukan minimal setiap semester untuk menilai efektivitas layanan, kendala di lapangan, dan kebutuhan perbaikan program.
- b) Hasil evaluasi kemudian dijadikan dasar pengambil kebijakan sekolah untuk memperbaiki sistem layanan BK secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018).

Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2014/2015 reprint). *Developing and Managing Your School Guidance and Counseling Program (5th ed.)*. John Wiley & Sons.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Permendikbud RI No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling.



- Winkel, W. S., & Hastuti, S. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Media Abadi.
- Yusuf, S. (2017). *Konseling Individual: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. PT Refika Aditama.
- Natawidjaja, R. (2015). *Manajemen Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Prayitno & Amti, E. (2018). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta.
- Gladding, S. T. (2018). *Counseling: A Comprehensive Profession (8th ed.)*. Pearson.
- Dahlan, A., & Supriyanto, A. (2017). *Implementation of Comprehensive Guidance and Counseling Program in Senior High Schools*. International Journal of Instruction, 13(3), 245–260.
- Rahman, A., & Yusuf, S. (2015). *School Counseling Services and Students' Developmental Needs in Indonesian Schools*. Counseling International Journal, 8(2), 77–89.
- Setiawan, H. (2018). *The Role of Homeroom Teachers in Supporting School Counseling Programs*. Jurnal Konseling Indonesia, 5(1), 12–22.
- Katuuk, D. A. (2020). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Penguatan Layanan Peserta Didik*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 6(2), 188–198.
- Sari, P. & Fadhilah, N. (2016). *Analisis Rasio Guru BK dan Dampaknya terhadap Efektivitas Layanan Konseling*. Jurnal Bimbingan Konseling, 10(1), 15–28.
- Tompodung, S., & Maramis, J. (2019). *Evaluasi Program BK Komprehensif di SMA Kota Manado*. Jurnal Paradigma Pendidikan, 4(2), 55–67.
- Putri, Y. & Hakim, M. (2020). *Documentation Practices in School Counseling Services: Issues and Recommendations*. Asian Journal of Guidance and Counseling, 11(1), 25–36.
- Supriyo, B. (2016). *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yusuf, S., & Nurihsan, J. (2010). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Remaja Rosdakarya.

